

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Papua merupakan pulau yang berada di wilayah paling timur Indonesia dan merupakan provinsi paling luas wilayahnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurut data dari laman Papua, lebih dari 75% daerah Papua masih tertutup oleh hutan-hutan tropis yang lebat. Sekitar 80% penduduknya masih dalam keadaan semi terisolir di daerah pedalaman (<http://www.papua.go.id>).

Penduduk asli Papua dikelompokkan dalam etnis Melanesia yang memiliki ciri-ciri berkulit gelap dan berambut keriting. Dalam kepustakaan Antropologi, Papua dikenal sebagai masyarakat yang terdiri atas suku-suku bangsa dan suku-suku yang beraneka ragam kebudayaannya. Menurut Tim Peneliti Universitas Cendrawasih (1991) telah diidentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing merupakan sebuah satuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku (Djoht, 2002).

Kebudayaan penduduk asli di daerah-daerah pedalaman Papua kebanyakan masih asli (tradisional) dan sulit untuk dilepaskan. Kebudayaan penduduk asli di daerah pantai sudah mengalami perubahan (walaupun tidak seluruhnya), hal itu disebabkan oleh kemudahan transportasi dan komunikasi. Masyarakat di daerah pantai biasanya lebih cepat menerima pengaruh atau perubahan dari luar. Beberapa

kelompok suku tertentu terutama di daerah pedalaman (Jayawijaya), Merauke, Yapen Waropen, dan Paniai masih tetap mempertahankan kebudayaan aslinya secara utuh dan sulit dipengaruhi kebudayaan luar (<http://www.papua.go.id>).

Menurut Held (1951,1953) dan Van Baal (1954), ciri-ciri yang menonjol dari Papua adalah keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri kebudayaan mereka. Perbedaan-perbedaan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat Papua dapat dilihat perwujudannya dalam bahasa, sistem-sistem komunikasi, kehidupan ekonomi, keagamaan, ungkapan-ungkapan kesenian, struktur politik dan struktur sosial, serta sistem kekerabatan yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tersebut sebagaimana terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kelompok suku asli Papua menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Bila dilihat kategori suku bangsa berdasarkan bahasa maka ada 271 lebih suku bangsa berarti ada 271 lebih kebudayaan (Djoht, 2002). Saat berinteraksi dengan orang dari suku lain, orang Papua menggunakan bahasa Indonesia bercampur sedikit bahasa seperti rumpun melayu (<http://www.dprp.go.id>).

Selain suku bangsa Papua, banyak juga pendatang dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan yang tinggal di Papua. Chauvel (2005) dalam Suryawan (2011) mengatakan bahwa banyaknya pendatang dari luar Papua memperbesar perasaan bahwa orang Papua dimarginalisasi. Lebih lanjut lagi Suryawan (2011) mengemukakan bahwa orang Papua cenderung didiskriminasi.

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak untuk memperoleh pendidikan tertulis dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, di dalamnya tercantum bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak setiap orang tanpa batasan status sosial maupun ekonomi (<http://www.komisiyudisial.go.id>). Dengan demikian, kesempatan untuk memperoleh pendidikan berhak dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia dari Aceh sampai Papua.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan kualitas SDM Papua, beberapa instansi dari Papua mengadakan kerja sama dengan Yayasan “X” di Kota Tomohon (Sulawesi Utara) berupa pemberian beasiswa bagi beberapa siswa dari Papua untuk bersekolah di SMA “X”. SMA “X” berada di bawah naungan Yayasan “X”. SMA “X” adalah salah satu sekolah swasta yang merupakan sekolah favorit di Tomohon, terkenal dengan prestasi-prestasi para siswanya baik di tingkat daerah maupun nasional.

Visi SMA “X” adalah menciptakan manusia berbudaya, beradab, unggul akademik, utuh dalam kepribadian dengan kematangan emosi, fisik sehat, kepemimpinan berwawasan luas, beriman, berbudi pekerti luhur, dan peduli masyarakat, warisan budaya serta lingkungan. Sedangkan misinya antara lain adalah: menumbuh-kembangkan kemampuan bertanya, mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah; membentuk peserta didik yang memiliki emosi yang seimbang, cara berpikir yang sehat, arif dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung-jawab; menjalin kemitraan dengan orang tua dan pihak terkait lainnya untuk membangun komunitas sekolah yang terbuka bagi peran-serta masyarakat; memotivasi peserta didik untuk berinteraksi dengan sesamanya dan menumbuh

kembangkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai sosial budaya (<http://smalokon.com>).

Pada tahun ajaran 2013/ 2014, SMA “X” memfasilitasi 400 siswa yang berasal dari seluruh Indonesia. Sebanyak 66 siswa atau 16,5% di antaranya adalah siswa-siswa penerima beasiswa yang berasal dari Papua. Di tahun ajaran 2013/ 2014 ada 20 siswa asal Papua yang diterima untuk bersekolah di SMA “X”. Siswa-siswa tersebut berasal dari suku yang berbeda-beda. Sebanyak 14 siswa berasal dari suku Amungme, 3 siswa dari suku Kamoro, 1 siswa dari suku Merauke, 1 siswa dari suku Damal, dan 1 siswa dari suku Mee.

Para siswa dari Papua rata-rata menempuh pendidikan selama 4 tahun di SMA “X”, selama satu tahun pertama mereka mengikuti program matrikulasi. Kelas matrikulasi khusus dibuka untuk siswa-siswa dari Papua agar mereka bisa menyesuaikan baik dari segi akademis maupun budaya. Semua siswa yang bersekolah di SMA “X” tinggal dalam asrama. Asrama untuk para siswi dipisahkan dengan asrama untuk para siswa.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA “X” mengungkapkan bahwa siswa-siswa dari Papua pada umumnya sulit berbaur dengan siswa-siswa dari etnis lain. Padahal pihak sekolah telah mengatur sedemikian rupa agar pada saat pembagian kelas dan asrama semua siswa bisa berbaur. Siswa-siswa dari Papua pernah terlibat perkelahian fisik dengan sesama siswa dari Papua yang berbeda sub-etnis. Pengurus asrama pernah mengelompokkan siswa-siswa dari etnis Papua ke dalam kamar yang sama dengan harapan supaya pembinaan lebih fokus dan efektif

serta mereka bisa mengakrabkan diri namun mereka mengeluh dan merasa didiskriminasi dengan pengaturan itu, sebaliknya pada saat mereka digabung di kamar yang sama dengan siswa dari etnis lain mereka justru berkelompok lagi dengan sesama siswa dari Papua. Permasalahan yang muncul antara sesama siswa Papua cenderung berulang pada setiap angkatan yang masuk.

Penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang siswa asal etnis Minahasa, seperti yang diungkapkan oleh guru BK, menurut mereka pada umumnya siswa-siswa dari Papua sulit berbaur dengan siswa dari etnis lain. Rata-rata siswa Papua bersikap pasif saat bertemu dengan siswa dari etnis lain baik di asrama maupun saat di sekolah, mereka terkesan kurang percaya diri, sulit mengungkapkan pikiran mereka dan suka menunduk saat berbicara secara personal.

Untuk memetakan permasalahan para siswa dari Papua, diberikan kuesioner komunikasi yang dikembangkan dari kuesioner komunikasi interpersonal yang disusun oleh Hermaya R. D. A. (2007) sebagai survey awal terhadap 20 siswa asal Papua di kelas matrikulasi. Terdapat 10 (50 %) siswa yang tidak paham bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Ada 4 (20 %) siswa merasa kesulitan ketika berkomunikasi dengan teman-temannya, sedangkan 9 (45 %) siswa merasa kesulitan untuk menyampaikan ide-idenya secara teratur. Ada 5 (25 %) siswa yang melaporkan bahwa pada saat mereka berbicara, orang yang berbicara dengan mereka pada umumnya sulit memahami apa yang mereka katakan. Sebanyak 7 (35 %) siswa mengaku tidak bisa menunjukkan sikap empati pada orang lain. Ada 5 (25 %) siswa yang merasa kesulitan dalam berkomunikasi karena tidak percaya diri.

Selain pengisian kuesioner komunikasi interpersonal, dilakukan wawancara dengan wali kelas matrikulasi dan 8 siswa Papua yang sedang mengikuti kelas matrikulasi. Menurut mereka, timbulnya masalah antar siswa Papua disebabkan karena komunikasi yang terjalin antar para siswa kurang efektif. Ketua kelas matrikulasi mengungkapkan bahwa beberapa teman sekelasnya cenderung bersikap pasif dalam berkomunikasi, mereka sulit untuk bereaksi secara terbuka terhadap apa yang diucapkan oleh pembicara, dan saat berbicara artikulasi mereka kurang jelas. Wali kelas matrikulasi melaporkan beberapa perkelahian terjadi karena kurangnya empati. Beberapa siswa dari Papua suka meremehkan secara terang-terangan bila ada siswa yang diminta guru untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Sebanyak 6 orang (75%) siswa yang diwawancara merasa teman-teman dari Papua kasar saat berbicara dengan mereka. Selain itu, 3 siswi melaporkan bahwa teman-teman pria hampir selalu berbicara dengan intonasi yang keras.

Dari hasil kuesioner dan wawancara, bisa disimpulkan bahwa masalah para siswa dari Papua khususnya siswa-siswa kelas matrikulasi terletak pada kurangnya empati, kurangnya rasa kebersamaan dengan teman-teman, masalah kepercayaan diri, dan kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi.

Sue (1990, dalam Santrock, 2002) mengungkapkan bahwa remaja dari etnis atau budaya yang berbeda saat menjalin relasi bisa menemui masalah akibat sistem nilai yang berbeda. Masalah dalam relasi bisa disebabkan oleh sistem nilai, budaya, atau perbedaan lain. Perbedaan budaya bisa mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi sehingga memperbesar kemungkinan salah paham, salah persepsi, dan

potong kompas/ *bypassing* (DeVito, 1997).

DeVito (2012) mengemukakan bahwa dalam berinteraksi dengan sesama, komunikasi tak dapat dihindari. Banyak waktu dan energi komunikasi yang dihabiskan untuk membina dan memelihara hubungan sosial. Hal yang membuat suatu hubungan tetap ada adalah kuantitas dan kualitas dari komunikasi yang terjadi dalam hubungan tersebut. Komunikasi adalah syarat untuk memelihara kepuasan dalam suatu hubungan (Alexander, 1973 dalam Nicotera). Komunikasi menjadi sarana yang penting untuk menunjang terjadinya proses transfer ilmu dan terbinanya hubungan sosial antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan guru dengan guru. Tanpa komunikasi, tujuan dalam dunia pendidikan mustahil untuk tercapai. Hal ini seturut dengan pendapat DeVito (2012) bahwa salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan.

Hubungan sosial di antara siswa dalam suatu kelas berakar pada komunikasi dari anggota-anggota kelompok yang ada di kelas tersebut (Winkel, 1996). Bila anggota-anggota kelompok dalam kelas terdiri dari siswa-siswa yang berbeda budaya, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya mengacu pada komunikasi antara orang-orang dari kultur yang berbeda, antara orang yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural yang berbeda (DeVito, 1997). Masalah yang muncul diantara para siswa dari Papua bisa dijumpai apabila komunikasi antarbudaya terjalin dengan efektif. Karakteristik komunikasi antarbudaya yang efektif adalah: kepercayaan diri, kedekatan/ kebersatuan (*immediacy*), manajemen interaksi, daya ekspresi, dan berorientasi

kepada pihak lain (DeVito, 1997).

Spitzberg dan Cupach (1989, dalam DeVito, 1997) berpendapat bahwa kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan (konteks) dalam mempengaruhi kandungan (*content*) dan bentuk pesan komunikasi – misalnya pengetahuan bahwa suatu topik layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi tidak layak bagi pendengar dan lingkungan lain. Pengetahuan tentang tatacara perilaku nonverbal – misalnya kepatutan sentuhan, suara yang keras, serta kedekatan fisik – juga merupakan bagian dari kompetensi komunikasi. Menurut DeVito (1997), individu mempelajari komunikasi seperti belajar bagaimana tatacara makan dengan sendok dan garpu melalui pengamatan terhadap orang lain, melalui petunjuk eksplisit, melalui coba-coba, dan sebagainya. Dengan demikian, keterampilan untuk berkomunikasi antarbudaya secara efektif bisa dilatih. Salah satu cara untuk membantu para siswa Papua meningkatkan kemampuan dalam melakukan komunikasi antarbudaya secara efektif adalah dengan memberikan pelatihan (*training*) komunikasi antarbudaya.

Penelitian yang diadakan di Universitas Kristen Chang Jung Taiwan terhadap para ekspatriat yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan untuk pengembangan komunikasi antarbudaya menyimpulkan bahwa pelatihan ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan mereka untuk berhubungan dengan karyawan lokal (Ko & Yang, 2011). Demikian juga penelitian yang diadakan di Rotterdam mengenai pelatihan komunikasi antarbudaya terhadap para tenaga medis dan pasien yang

digolongkan ke dalam dua kategori “*western*” dan “*non-western*” mengungkap bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan setelah para tenaga medis dan pasien mengikuti pelatihan komunikasi antarbudaya (Harmsen, et.al., 2005). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk merancang dan menguji coba suatu modul pelatihan komunikasi antarbudaya untuk siswa-siswa Papua di SMA “X” kota Tomohon.

Pelatihan sebagai metode belajar dipilih karena penggunaan pendekatan ini dianggap sesuai untuk mencapai keberhasilan karena tidak hanya memfasilitasi pemahaman pada konsep, melainkan menjadi sarana dalam mengembangkan suatu kemampuan tertentu (Silberman, 2006). Setelah diberikan pelatihan, diharapkan para siswa dari Papua bisa meningkatkan kemampuan komunikasi antarbudaya mereka.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui apakah rancangan modul Pelatihan Komunikasi Antarbudaya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi antarbudaya para siswa di SMA “X” Tomohon yang berasal dari Papua?

1. 3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. 3. 1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang dan mengujicobakan modul Pelatihan Komunikasi Antarbudaya serta memperoleh gambaran perubahan kemampuan komunikasi antarbudaya siswa-siswa Papua di SMA “X” Tomohon

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan komunikasi antarbudaya.

1. 3. 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan modul Pelatihan Komunikasi Antarbudaya yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi antarbudaya siswa-siswa Papua di SMA “X” Tomohon.

1. 4. Kegunaan Penelitian

1. 4. 1. Kegunaan Teoritis

- 1) Modul pelatihan untuk memberikan informasi mengenai peningkatan kemampuan komunikasi antarbudaya.
- 2) Sebagai landasan informatif untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Psikologi Komunikasi dan Psikologi Lintas Budaya.

1. 4. 2. Kegunaan Praktis

- 1) Modul pelatihan diharapkan bisa membantu siswa-siswa dari Papua di SMA “X” Kota Tomohon untuk mengatasi masalah mereka dalam hal komunikasi antarbudaya.
- 2) Modul pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan komunikasi antarbudaya.
- 3) Sebagai masukan bagi pihak sekolah mengenai cara intervensi masalah serupa bagi siswa-siswa dari Papua angkatan selanjutnya sehingga bisa

dijadikan upaya pencegahan (prevensi) untuk angkatan-angkatan selanjutnya.

1. 5. Metodologi

Penelitian ini merupakan *program evaluation research*. *Program evaluation research* bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan-tujuan yang dicapainya (Raulin & Graziano, 2000).

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pretest-Posttest Design*. Penelitian dilakukan pada sekelompok siswa dari Papua di SMA “X” Tomohon. Sebelum dan setelah Pelatihan Komunikasi Antarbudaya dilaksanakan, dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur kemampuan Komunikasi Antarbudaya dari para peserta pelatihan. Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Rancangan Penelitian

